

Strategi dan Konsep Teoritis dalam Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Mega Yesi Okta Fihana¹

¹Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

ABSTRACT

Purpose – This research seeks to fill this gap by exploring educational funding theory and applying it concretely in the Indonesian context. Thus, this research is hoped to provide new insights and significantly contribute to designing more effective and inclusive policies to improve the Indonesian education system.

Methods – This research uses a descriptive research type method to better understand education financing from various theoretical and practical perspectives.

Findings – The research results show that financing education is very important because education can have significant costs, especially at the higher education level. Indonesia has taken steps to improve education financing and increase the accessibility and quality of education, the application of innovation in education financing in Indonesia has the potential to increase educational resources and the quality of education and ensure that every individual has an equal opportunity to get a quality education, but it is necessary considering Indonesia's social, economic, and cultural context as well as efforts to ensure long-term sustainability.

Research Implications – The phenomenon of increasing education costs is a concern and requires a balance between adequate funding, efficient allocation, and transparent management so that the right to education can be enjoyed without financial obstacles by all citizens. studies may not consider local factors that can influence the effectiveness of financing models, such as geographic conditions and cultural diversity in various regions of Indonesia. Further research with a contextual approach can provide more comprehensive insight into education financing problems at the local level.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 07-10-2024

Revised: 16-01-2024

Accepted: 16-01-2024

KEYWORDS

education financing,
theoretical concepts,
financing strategy

Corresponding Author:

Mega Yesi Okta Fihana

Magister Administrasi Pendidikan, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak
Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak
Email: megayesioktafihana@gmail.com

Pendahuluan

Keyakinan lama mengenai peran bantuan dalam mempercepat pembangunan pendidikan kini tengah mendapat sorotan tajam (Lewin dan Sabates, 2012; Mundy dan Verger, 2015; Heyneman dan Lee, 2016; Samoff dkk., 2016; Klees, 2018; Burnett, 2019). Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendanaan pendidikan, termasuk meningkatkan alokasi dana publik, mendukung program beasiswa, dan mendorong investasi swasta dalam pendidikan. "Krisis pembelajaran" yang dipublikasikan baru-baru ini sebagian disebabkan oleh masalah efektivitas bantuan (Bank Dunia, 2018). Adanya upaya yang signifikan nyatanya masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia, seperti ketidaksetaraan akses pendidikan, kesenjangan pendanaan antar wilayah, dan ketidakpastian dalam pendanaan jangka panjang.

Menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam mencapai akses pendidikan yang merata dan berkualitas di tengah keragaman geografis serta populasi yang besar. Seiring dengan itu, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendanaan pendidikan, namun "krisis pembelajaran" yang baru-baru ini dipublikasikan menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas bantuan dan upaya yang masih perlu dilakukan.

Gap penelitian dengan penelitian sebelumnya dapat diidentifikasi dari kurangnya fokus pada integrasi konsep teoritis dalam strategi pembiayaan pendidikan di Indonesia. Sebagian besar penelitian cenderung memaparkan praktik-praktik pembiayaan yang telah dilakukan tanpa melakukan analisis mendalam terhadap landasan teoritis yang mendasarinya. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan ini dengan mengeksplorasi teori pendanaan pendidikan dan menerapkannya secara konkret dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi signifikan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan inklusif dalam meningkatkan sistem pendidikan Indonesia.

Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Kajiannya termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan. Adapun pendekatan yang ditempuh adalah paradigma kualitatif dengan sifat datanya bukan data statistik (Rukminingsih,

2020). Datanya diambil dengan teknik dokumentasi yang berasal dari berbagai sumber literatur seperti buku dan jurnal penelitian (Sugiyono, 2017). Selanjutnya data yang diperoleh dan terkumpul dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Materi utama pada bagian ini adalah (1) Konsep Teoritis dalam Pembiayaan Pendidikan, (2) Implikasi Pembiayaan Pendidikan di Indonesia, (3) Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia, (4) Integrasi Konsep Teoritis dalam Strategi Pembiayaan Indonesia, (5) Tantangan dalam Pembiayaan Pendidikan di Indonesia, (6) Inovasi dan Implikasi Pembiayaan Pendidikan di Indonesia.

Hasil

1. Konsep Teoritis dalam Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan adalah proses atau tindakan menyediakan dana atau sumber daya finansial untuk mendukung suatu kegiatan, proyek, atau tujuan tertentu. Dalam konteks umum, pembiayaan melibatkan pengalokasian uang atau sumber daya finansial agar sesuatu dapat direalisasikan atau dilakukan. Pembiayaan bisa berlaku dalam berbagai konteks, termasuk di bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan sektor publik. Johns dan Morphet (1983) mengemukakan bahwa pendidikan itu mempunyai peranan vital terhadap ekonomi dan negara modern.

Menurut Supriyono dalam Dinda (2019), biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Dalam konteks pendidikan, pembiayaan pendidikan mengacu pada sumber-sumber dana yang digunakan untuk mendukung sistem pendidikan, termasuk pembangunan fasilitas pendidikan, gaji guru, penyediaan materi pelajaran, beasiswa, dan berbagai komponen lain yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah hal yang penting karena berkontribusi secara signifikan terhadap mutu dan aksesibilitas pendidikan suatu negara.

Menurut Levin dalam Dinda (2019), pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan lembaga pendidikan di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Biaya pendidikan menurut Supriyadi (2003), merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental-input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan

dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.

Menurut Fattah (2009) biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Jadi disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah proses menyediakan sumber daya finansial, baik dalam bentuk uang maupun barang, untuk mendukung pendidikan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan. Pendidikan bisa mencakup tingkat pendidikan formal seperti sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, maupun pendidikan non-formal atau pelatihan keterampilan.

Yayan Sofyan (et.al) mengemukakan bahwa konsep biaya pendidikan sekolah antara lain:

(1) *Joint Cost* Pendidikan

Konsep ini muncul untuk menilai implikasi dari berbagai produk yang dihasilkan oleh pendidikan (seperti cognitive dan noncognitive outputs) atau oleh pendidikan tinggi (teaching dan research) karena sulit diukur single cost untuk single output /product beberapa input menghasilkan dua atau lebih output, seperti misalnya bangunan-bangunan sekolah, administrasi pusat, perpustakaan-perpustakaan, dan lain-lain.

(2) Pendekatan Kecukupan (*Adequacy Approach*)

Pengukuran biaya pendidikan seringkali menitikberatkan kepada ketersediaan dana yang ada, tetapi secara bersamaan seringkali mengabaikan adanya standar minimal untuk melakukan pelayanan pendidikan. Konsep pendekatan kecukupan menjadi penting karena memasukkan berbagai standar kualitas dalam perhitungan pembiayaan pendidikan, sehingga berdasarkan berbagai tingkat kualitas pelayanan pendidikan tersebut dapat ditunjukkan adanya variasi biaya pendidikan yang cukup ideal untuk mencapai standar kualitas tersebut.

(3) Konsep Produksi

Konsep produksi di bidang pendidikan sebenarnya tidak berbeda dengan konsep produksi di perusahaan manufaktur. Hanya perbedaan dari *a set of inputs* (seperti waktu siswa dan guru, buku, jasa dari capital asset seperti bangunan sekolah) dan *a set of* dikorbankan agar transformasi ini terjadi padahal dapat dipakai untuk alternatif penggunaan yang lain (*opportunity cost*: seperti pendapatan yang seharusnya diperoleh bila siswa

tidak melanjutkan pendidikan tinggi dan biaya modal dari durable *assets outputs* (seperti kemampuan kognitif, sosialisasi, ilmu baru). Transformasi input menjadi output ini jelas bukan tanpa biaya, baik dari sisi pengeluaran dalam bentuk uang (*monetary expenditures*).

Pembiayaan pendidikan sangat penting karena pendidikan dapat memiliki biaya yang signifikan, terutama di tingkat pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi atau universitas. Memastikan akses yang lebih luas ke pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesetaraan dan memberikan peluang yang lebih baik bagi individu dalam mencapai potensi mereka.

2. Implikasi Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Armida (2011) mengatakan bahwa model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Seperti yang dikatakan oleh John S. Mrophet, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu:

(1) *Flat Grand Model*

Flat Grand Model Dengan menggunakan sistem distribusi dana, setiap distrik atau kabupaten/kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap siswa. Ini menghilangkan perbedaan kemampuan di antara daerah dengan sumber daya alam yang kaya dan daerah yang miskin. Untuk membiayai program pendidikan, semua distrik atau kabupaten/kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap siswa. Biaya per siswa dihitung dalam satu tahun, yang direfleksikan sebagai kebutuhan yang berbeda dalam unit biaya.

(2) *Equalization Model*

Equalization Model ini bertitik tolak pada *ability to pay* (kemampuan membayar) masyarakat. Sudah jelas bahwa masyarakat yang kurang mampu harus menerima bantuan dana yang lebih serius daripada masyarakat yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Sekolah-sekolah miskin akan memiliki kesempatan yang sama dengan sekolah-sekolah lainnya. Artinya, setiap tahun, setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda, tergantung pada bagaimana mereka membagi dana sesuai dengan kemampuan mereka. Daerah yang kurang beruntung akan menerima lima dolar per mil, ditambah tujuh dolar per mil dari dana dasar daerah.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kedua model ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatasi ketidaksetaraan dalam pembiayaan pendidikan. Model *Flat Grant* cenderung lebih sederhana dengan alokasi dana

yang sama untuk semua, sedangkan *Equalization* Model lebih berorientasi pada redistribusi dana untuk mencapai kesetaraan pendidikan. Pilihan antara kedua model ini akan sangat tergantung pada konteks dan tujuan pembiayaan pendidikan di suatu negara atau daerah. Untuk mengelola pembiayaan pendidikan, diperlukan ide dan sistem perencanaan yang matang. Ini akan memungkinkan untuk membangun sistem pembiayaan pendidikan nasional di Indonesia dengan otonomi daerah.

Kondisi di Indonesia, model pembiayaan tidak dapat bergantung pada subsidi pemerintah pusat, meskipun telah memiliki wewenang sesuai dengan UU Otonomi Daerah. Ini disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam atau penghasilan (PAD) yang signifikan dan perhatian yang lebih besar terhadap investasi pendidikan. Pemerintah Alokasikan Anggaran Pendidikan Tahun 2023 Sebesar Rp. 608,3 Triliun (Kemenkeu, 2022). Anggaran pendidikan tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Menkeu Sri Mulyani dalam informasi publik Kemenkeu (2022) menyampaikan garis besar kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023 dalam paparannya antara lain : (1) Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, (2) Peningkatan kualitas sarana prasarana yang mendukung kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T, (3) Penguatan hubungan dan match dengan pasar kerja, (4) Pemerataan pendidikan, dan (5) Peningkatan layanan PAUD.

Semua yang telah dicapai di bidang pendidikan selama ini, terlepas dari jumlah anggaran yang dialokasikan pemerintah, tidak serta merta menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebagai perbandingan, dengan alokasi anggaran yang sama, Vietnam mampu berada di peringkat 8 dalam kualitas pendidikan global, sedangkan Indonesia saat ini hanya berada di peringkat 58. Bank Dunia mengatakan Indonesia sama seperti Vietnam yang berdedikasi pada bidang pendidikan, tetapi peringkat Vietnam adalah 8, sedangkan Indonesia adalah 58. Meskipun mereka berkomitmen, hasilnya berbeda. Ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan dan kesehatan bukan hanya masalah uang. Pendidikan di Indonesia sangat buruk, tidak lepas dari kinerja guru yang dinilai yang tidak memiliki kompetensi yang diperlukan. Padahal, pemerintah membayar sekitar empat juta guru setiap tahun.

Tabel 1. Belanja Pendidikan di Negara ASEAN

Negara	(% to govt spending)	(% to GDP)	Data Tahun
Malaysia	21	5	2017
Indonesia	21	4	2018
Singapura	20	3	2013
Thaliand	19	4	2013
Vietnam	19	6	2013
Filipina	13	3	2009
Laos	12	3	2009
Brunei	11	4	2016

Sumber: CNBC Indonesia, Arif Gunawan (2019)

Alokasi belanja Indonesia jelas lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dengan kata lain, amanat konstitusi tersebut, jika digunakan dengan benar, memungkinkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Sayangnya, bahkan setelah satu dekade, indeks sumber daya manusia kami masih kurang dari rata-rata Asia Pasifik. Komunitas pendidikan belum pernah berkumpul untuk membahas strategi tata kelola dan kinerja yang lebih baik sejak konstitusi kita meminta dua puluh persen anggaran untuk pendidikan. Karena pengeluaran yang signifikan, indeks SDM kita tidak langsung meningkat seperti negara-negara maju.

3. Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Algoritma sederhana memberikan indikasi permintaan pembiayaan untuk pendidikan (Lewin, 2008). Ini dapat digunakan untuk menghitung berapa banyak uang yang harus dikeluarkan pemerintah untuk sistem pendidikan mereka dan berapa banyak yang harus dikeluarkan jika mereka ingin mencapai partisipasi universal dari prasekolah hingga sekolah dasar hingga sekolah menengah dan tingkat partisipasi yang jauh lebih tinggi di perguruan tinggi.

Perhitungan dasar pembiayaan pendidikan adalah bahwa sumber daya yang dibutuhkan dalam persentase PDB per kapita ditentukan oleh tingkat partisipasi yang diinginkan, proporsi anak usia sekolah, dan biaya per siswa per tahun (Lewin, 2008). Pembiayaan juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pendanaan publik (dari pemerintah), pendanaan swasta (dari sektor swasta), beasiswa, pinjaman pendidikan, dan sebagainya. Pendidikan berkualitas tinggi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat adalah tujuan pembiayaan. Pembiayaan pendidikan sangat penting karena berperan dalam memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama ke pendidikan dan bahwa pendidikan memiliki kualitas yang baik. Pembiayaan pendidikan biasanya dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pembiayaan

pendidikan juga melibatkan investasi dana atau sumber daya keuangan dalam pendidikan untuk mencapai keuntungan jangka panjang, seperti peningkatan kualitas hidup, peningkatan peluang pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia kini memiliki belanja pemerintah terbesar kedua di Asia Tenggara untuk pendidikan, meskipun masih menghadapi masalah dengan kualitas sumber daya manusia. Sebuah laporan yang dirilis tahun lalu oleh Bank Dunia mengenai Indeks Sumber Daya Manusia 2018 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-87 dari 157 negara, dengan skor sebesar 0,53. Artinya, setiap anak yang lahir di Indonesia saat ini memiliki 53% peluang untuk berkembang, asalkan mereka menyelesaikan sekolah dan memiliki akses penuh ke perawatan kesehatan. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Timur dan Asia Pasifik, pencapaian ini masih lebih rendah, dengan skor rata-rata 0,62.

Di Asia Tenggara, investasi SDM Indonesia masih kurang dari Singapura (0,88%), Vietnam (0,67%), Malaysia (0,62%), Thailand (0,60), dan Filipina (0,55). Dengan memperhitungkan peluang survivalitas, kualitas dan kuantitas pendidikan, serta masalah kesehatan, Indeks Sumber Daya Manusia menjelaskan perkembangan kondisi pendidikan dan kesehatan antar negara. Kabar ini jelas tidak menggembirakan karena, sejak sepuluh tahun yang lalu, Indonesia telah mengalokasikan seperlima dari anggaran negaranya untuk memajukan sektor pendidikan, berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013/PUU-VI/2008.

Indonesia memiliki sejumlah pengalaman dalam menerapkan strategi pembiayaan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, mutu, dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Beberapa pengalaman penting dalam konteks ini meliputi:

(1) Pengalaman Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Indonesia telah meluncurkan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang memberikan bantuan keuangan kepada siswa miskin untuk membantu mereka mengakses pendidikan dasar dan menengah. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan dan meningkatkan partisipasi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

(2) Peningkatan Alokasi Dana untuk Pendidikan

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan alokasi dana untuk pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini mencakup alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan gaji guru, dan

penyediaan buku pelajaran. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh negeri.

(3) Pendanaan Berbasis Desa (Dana Desa)

Program Dana Desa di Indonesia memungkinkan desa-desa untuk mengalokasikan sebagian dari dana mereka untuk pendidikan, termasuk pembangunan sekolah dan program-program pendidikan lainnya. Ini memberikan kontrol lebih besar kepada komunitas lokal dalam pembiayaan pendidikan mereka.

(4) Pendanaan Berbasis Hasil

Beberapa provinsi di Indonesia telah menerapkan sistem pembiayaan berbasis hasil di mana alokasi dana untuk lembaga pendidikan diberikan berdasarkan pencapaian mereka dalam hal hasil pendidikan, seperti tingkat kelulusan atau hasil ujian nasional.

(5) Pembiayaan Berbasis *Crowdfunding*

Beberapa inisiatif pendidikan di Indonesia telah menggunakan pendekatan crowdfunding untuk menggalang dana untuk proyek-proyek pendidikan tertentu. Ini termasuk pendanaan untuk pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, dan pengadaan peralatan pendidikan.

(6) Kemitraan Publik Swasta

Indonesia telah menciptakan kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan pendidikan. Perusahaan swasta seringkali berkontribusi dalam bentuk CSR atau program-program kemitraan yang mendukung pendidikan, termasuk pengembangan sekolah-sekolah.

(7) Pembiayaan Berbasis Teknologi

Indonesia mulai memanfaatkan teknologi keuangan (*FinTech*) untuk memudahkan proses pembiayaan pendidikan. Aplikasi seluler dan platform daring digunakan untuk penggalangan dana dan pembayaran pendidikan.

Implikasi dari pengalaman-pengalaman ini adalah bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pembiayaan pendidikan dan meningkatkan aksesibilitas serta mutu pendidikan. Namun, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi dan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pendidikan dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan bijak untuk mendukung pendidikan yang berkualitas bagi semua warga negara.

4. Integrasi Konsep Teoritis dalam Strategi Pembiayaan Indonesia

Studi dan laporan yang ada mengidentifikasi berbagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Heyneman dan Loxley, 1983; Lockheed dan Verspoor, 1990; White, 2004; Lewin dan Caillods, 2000; Lewin, 2008, GEMR, 2016, Bank Dunia, 2018). Daftar ringkas isu-isu terpilih yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan mencakup: (1) Ketimpangan, (2) Prestasi yang rendah, (3) Persebaran sekolah, (4) Rasio guru dengan siswa, (5) Deregulasi pelatihan guru, (6) Tujuan dan komitmen pembangunan berkelanjutan. Konsep teoritis memengaruhi strategi pembiayaan di Indonesia dengan memberikan landasan intelektual dan panduan bagi pengambilan kebijakan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembiayaan pendidikan. Berikut adalah cara konsep teoritis memengaruhi strategi pembiayaan di Indonesia:

(1) Pandangan tentang Pendidikan

Konsep teoritis tentang pendidikan, seperti teori kemanusiaan dalam pendidikan, menekankan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia. Ini mendorong pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi dalam perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pandangan ini memengaruhi alokasi sumber daya dan kebijakan pendidikan yang lebih berorientasi pada pelayanan kepada warga negara.

(2) Pemahaman tentang Keadilan

Konsep teoritis tentang keadilan dalam pendidikan menyoroti pentingnya memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Ini mendorong upaya untuk merancang program pembiayaan yang memprioritaskan mereka yang membutuhkan dukungan ekstra, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan langsung kepada siswa-siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

(3) Pandangan tentang Pertumbuhan Ekonomi

Konsep teoritis tentang pertumbuhan ekonomi menghubungkan investasi dalam pendidikan dengan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Teori ini dapat memengaruhi kebijakan pembiayaan pendidikan dengan menunjukkan bahwa meningkatkan akses dan mutu pendidikan dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

(4) Teori Pengelolaan Keuangan

Konsep teoritis tentang pengelolaan keuangan yang baik dalam pendidikan memandang bahwa pengelolaan dana harus transparan, efisien, dan akuntabel. Pandangan ini dapat memengaruhi praktik

pengelolaan dana pendidikan untuk memastikan bahwa dana dialokasikan dengan benar dan efektif.

(5) Pandangan tentang Kemitraan

Konsep teoritis tentang kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan pendidikan memandang bahwa sektor swasta dapat berperan dalam mendukung pendidikan. Ini dapat mendorong penciptaan kemitraan yang mendukung pembiayaan pendidikan, seperti program-program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang mendukung pendidikan.

(6) Teori Pendanaan Publik

Konsep teoritis tentang pendanaan publik memandang bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pembiayaan pendidikan. Ini memengaruhi alokasi anggaran pemerintah untuk pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan program pembiayaan.

Dengan memahami konsep-konsep teoritis ini, pemerintah Indonesia dapat merancang strategi pembiayaan pendidikan yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip dasar dalam pembiayaan pendidikan dapat membantu pengambilan kebijakan yang lebih berfokus pada pemenuhan hak pendidikan, pengurangan ketidaksetaraan akses pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

5. Tantangan dalam Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Problem pendidikan nasional belum selesai. Semua orang menyadari bahwa biaya memasuki jenjang pendidikan saat ini semakin mahal, terutama dalam hal pembiayaan pendidikan. Fakta bahwa pendidikan berkualitas memerlukan biaya memang tidak salah. Namun, masalahnya adalah bahwa, karena sumber pendapatan yang tidak pasti, sebagian orang di negara ini masih tidak memiliki cukup uang. Selama pendaftaran siswa baru (PSB) beberapa waktu lalu, fenomena pendidikan yang membebani masyarakat ini juga sempat terlihat. Orang tua siswa juga dibuat marah tentang biaya yang harus mereka bayar untuk pendidikan anak mereka.

Pemerintah tidak lepas tangan dalam membiayai pendidikan, itu harus diakui. Pemerintah telah meluncurkan program bantuan operasional sekolah (BOS) yang terbatas untuk siswa SD dan SMP yang mengikuti program khusus. Selain itu, dana BOS khusus buku masih sangat sedikit untuk membeli satu buku

pelajaran berkualitas tinggi. Dengan dana BOS yang masih terbatas, ada kemungkinan bahwa pemerintah hanya akan membantu dan meringankan beban orang miskin. Jika itu benar, pemerintah mungkin dianggap tidak sensitif. Fakta bahwa angka drop out anak-anak usia sekolah antara usia 7 dan 12 tahun terus meningkat dari tahun ke tahun adalah buktinya. Namun, tidak banyak orang yang tahu tentang program BOS, yang didirikan pada tahun 2005 oleh Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 55 dengan tujuan membantu masyarakat yang tidak mampu.

Dalam hal ini, kita perlu memikirkan bersama persoalan pembiayaan pendidikan. Di lihat dari konstitusi, Pemerintah bertanggung jawab mutlak membiayai anak-anak usia sekolah untuk menempuh jenjang pendidikan dasar. Dalam UUD 1945 Pasal 31 (2) ditegaskan mengenai kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar setiap warga negara. Kita tentu melihat ketidaktaatan Pemerintah terhadap konstitusi. Jika mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 (2), anak usia sekolah berhak mendapatkan pendidikan dasar tanpa biaya. Lalu muncul pertanyaan, atas dasar apa pula pihak sekolah sering kali menarik pungutan-pungutan kepada siswa dan orang tua siswa. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 34 (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pun menggariskan agar Pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya.

Ditinjau lebih jauh, pemerintah tampak tak memiliki komitmen politik terhadap pendidikan. Sebut saja misalnya ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU No 18 tahun 2006 tentang APBN 2007 yang mengalokasikan anggaran pendidikan 11,8% bertentangan dengan UUD 1945 malah ditanggapi dingin Pemerintah. Tidak jauh berbeda pada 2006 lalu, dimana Pemerintah tidak merespon positif putusan MK yang memutuskan UU No 13 tahun 2005 tentang APBN 2006 dengan alokasi anggaran pendidikan 9,1% bertentangan dengan UUD 1945. Bagaimana pun, kita tidak bisa menutup mata terhadap mahalanya biaya menempuh jenjang pendidikan di negeri ini. Ketika disinggung tentang anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD sebagaimana amanat UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas, pemerintah selalu mengatakan tidak memiliki anggaran yang cukup. Ada sektor kebutuhan non-pendidikan yang semestinya juga harus diperhatikan disamping terus mengupayakan secara bertahap anggaran pendidikan menuju 20%.

Salah satu yang menjadi kritikal isu dalam kebijakan pembiayaan pendidikan adalah apakah yang dikatakan pemerintah terkait anggaran 20% pada APBN dan

APBD tidak cukup untuk membiayai pendidikan kita di Indonesia. Dana BOS yang dialokasikan pemerintah untuk jenjang pendidikan SD dan SMP dapat dikatakan berhasil mengurangi meningkatnya anak putus sekolah dari tahun ke tahun. Melihat kenyataan pengelolaan anggaran negara di republik ini, tampaknya terjadi ketidakefektifan di samping mentalitas korupsi yang masih akut. Pemerintah tidak bisa tidak memang perlu memikirkan lebih serius lagi pembiayaan pendidikan di Indonesia. Anggaran negara seyogianya dikelola lebih hemat dan efektif agar benar-benar memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Isi UUD 1945 menjanjikan kemajuan dalam pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui, Pasal 31(2) UUD 1945 merupakan perubahan ketiga, yang disahkan pada 10 November 2001, dan Pasal 31(4) UUD 1945 merupakan perubahan keempat, yang disahkan pada 10 Agustus 2002. Rumusan UUD 1945 yang diubah dengan amandemen itu secara tidak langsung meminta Pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan sektor pendidikan. Semua orang pasti setuju bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak boleh diabaikan karena tugas negara adalah meningkatkan kualitas hidup bangsa.

Para penyelenggara negara harus menyadari pentingnya pendidikan agar mereka dapat memprioritaskan pembangunan manusia melalui pendidikan. Jika hasil pendidikan tidak dapat dinikmati segera, penyelenggara negara yang pragmatis dan ingin menikmati hasil segera dapat memberatkan. Yang perlu diingat adalah bahwa pendidikan merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas manusia. Melalui pendidikan, orang dididik untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Negara yang ingin maju pasti tidak bisa mengabaikan pendidikan anak-anak mereka.

Jika kebijakan politik pendidikan yang tepat bertujuan untuk melindungi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki akses ke pendidikan, negara sebenarnya dapat membantu mengurangi biaya pendidikan yang mahal. Menurut Soedijarto (2006:28) negara kurang menyadari bahwa belum cerdasnya kehidupan bangsa, belum majunya kebudayaan nasional dan belum sejahteranya kehidupan rakyat secara berkeadilan, akarnya adalah karena masih rendahnya kualitas manusia Indonesia. Semua Negara maju dan yang kini menjadi Negara maju adalah Negara yang sejak mulai proses pembangunan bangsa telah meletakkan pendidikan sebagai elemen utamanya dan diberi alokasi anggaran pendidikan yang memadai. Kini rata-rata anggaran pendidikan anggota Uni Eropa adalah 5% Produk Domestik Bruto (PDB), Negara Belanda adalah 7% PDB atau

37% APBN. Di Asia, Indonesia merupakan yang terendah alokasinya hanya 1,4% PDB, sedangkan Negara lain, Malaysia 5,2% PDB, Vietnam 2,8% PDB, Filipina 3,4% PDB, Thailand 5,0% PDB, Korea Selatan 5,3% PDB, dan Jepang 7,0% PDB.

6. Inovasi dan Implikasi Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Lewin (2020) menyatakan bahwa ada dua cara untuk mendekati aspirasi pendidikan dengan realitas finansial: (1) Memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan lebih baik melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas, (2) Menghasilkan lebih banyak pendapatan dalam negeri melalui kebijakan fiskal yang efektif dan metode inovatif dalam membiayai barang-barang publik tanpa menimbulkan lebih banyak utang dan ketergantungan pada pendanaan eksternal.

Inovasi dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas, mutu, dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Berikut adalah beberapa inovasi dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia beserta implikasinya untuk peningkatan pembiayaan pendidikan:

(1) Pembiayaan Berbasis Teknologi

Penggunaan teknologi dalam pembiayaan pendidikan, seperti platform daring atau aplikasi seluler, dapat memudahkan penggalangan dana, pembayaran, dan manajemen keuangan. Ini dapat mengurangi biaya administrasi dan memastikan dana yang lebih besar dapat dialokasikan langsung ke pendidikan. Implikasinya yaitu pembiayaan berbasis teknologi dapat mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan, sehingga lebih banyak sumber daya dapat dialokasikan untuk kegiatan pendidikan.

(2) Pembiayaan Berbasis Hasil

Mengalokasikan dana pendidikan berdasarkan pencapaian hasil pendidikan, seperti tingkat kelulusan atau peningkatan mutu pelajaran, dapat memberikan insentif bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Implikasinya adalah pembiayaan berbasis hasil dapat mendorong akuntabilitas dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan, karena lembaga pendidikan harus mencapai target-target tertentu untuk mendapatkan dana tambahan.

(3) Kemitraan Publik Swasta

Menggandeng sektor swasta dalam pembiayaan pendidikan dapat membantu meningkatkan sumber daya pendidikan. Kemitraan ini dapat mencakup perusahaan yang mendukung pendidikan melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau berinvestasi dalam infrastruktur pendidikan. Implikasinya adalah kemitraan dengan sektor

swasta dapat memberikan sumber daya tambahan untuk pendidikan, yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas, pelatihan guru, atau penyediaan bahan ajar.

(4) Pendanaan Berbasis Masyarakat (*Community-Based Financing*)

Melibatkan masyarakat dalam penggalangan dana untuk pendidikan dapat memperkuat ikatan lokal dengan lembaga pendidikan. Program-program seperti "*savings groups*" atau koperasi pendidikan dapat membantu membiayai pendidikan di tingkat komunitas. Implikasinya adalah pendanaan berbasis masyarakat dapat mengurangi beban finansial pada pemerintah pusat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan lokal.

(5) Pembiayaan Berbasis Investasi Sosial

Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan organisasi internasional dan lembaga keuangan untuk mendapatkan investasi sosial dalam pendidikan. Dana ini dapat digunakan untuk proyek-proyek pendidikan yang memiliki dampak sosial yang signifikan. Implikasinya adalah pembiayaan berbasis investasi sosial dapat memberikan dana tambahan yang berkelanjutan untuk proyek-proyek pendidikan yang berdampak positif pada masyarakat.

(6) Pendanaan Berbasis Crowdfunding

Menggunakan platform crowdfunding untuk menggalang dana pendidikan dari individu dan organisasi dapat menjadi sumber pembiayaan yang signifikan untuk proyek-proyek pendidikan yang spesifik. Implikasinya adalah pendanaan berbasis crowdfunding dapat memungkinkan partisipasi lebih luas dalam pembiayaan pendidikan dan mendukung proyek-proyek pendidikan yang inovatif.

Penerapan inovasi-inovasi ini dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan sumber daya pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Namun, perlu mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia serta upaya untuk memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Pembahasan

Temuan dalam konsep teoritis pembiayaan pendidikan menunjukkan bahwa alokasi dana atau sumber daya finansial sangat penting dalam mendukung kegiatan pendidikan. Pembiayaan ini tidak hanya berpengaruh terhadap mutu pendidikan, tetapi juga terhadap aksesibilitas pendidikan suatu negara. Berbagai

aspek biaya pendidikan, seperti gaji guru, peralatan, buku pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan supervisi, menjadi bagian integral dari konsep ini. Di Indonesia, terdapat dua model pembiayaan utama, yakni *Flat Grant Model* dan *Equalization Model*, yang memiliki pendekatan berbeda terhadap kesetaraan dalam pembiayaan. Pilihan antara kedua model ini bergantung pada konteks dan tujuan pembiayaan pendidikan di suatu negara atau daerah. Otonomi daerah, ketersediaan sumber daya alam, dan perhatian terhadap investasi pendidikan menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan.

Meskipun alokasi anggaran pendidikan di Indonesia merupakan yang terbesar kedua di Asia Tenggara, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Investasi pendidikan tidak selalu menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan, terbukti dengan peringkat yang masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Oleh karena itu, manajemen yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan menjadi krusial untuk mendukung tujuan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berbagai model pembiayaan pendidikan di Indonesia, seperti Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), peningkatan alokasi dana untuk pendidikan, dan pendanaan berbasis hasil, menunjukkan upaya diversifikasi dalam pendekatan pembiayaan. Kemitraan antara sektor publik dan swasta, serta pemanfaatan teknologi keuangan (*FinTech*), juga menjadi bagian integral dari proses pembiayaan pendidikan di Indonesia.

Integrasi konsep teoritis, seperti pendidikan, keadilan, pertumbuhan ekonomi, pengelolaan keuangan, dan kemitraan, menjadi landasan strategi pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep ini membantu pemerintah merancang strategi pembiayaan yang lebih efektif sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Meskipun demikian, tantangan utama dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia melibatkan keterbatasan anggaran, kualitas guru, dan kebijakan yang belum sepenuhnya sesuai dengan amanat konstitusi. Diperlukan seriusitas pemerintah dalam memikirkan efisiensi pengelolaan dana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di tanah air.

Arah penelitian berikutnya dapat difokuskan pada beberapa aspek kunci yang muncul dari temuan dan implikasi tersebut : (1) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami dampak konkret dari berbagai model pembiayaan

pendidikan yang telah diterapkan di Indonesia, termasuk Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), peningkatan alokasi dana untuk pendidikan, dan pendanaan berbasis hasil. Analisis mendalam terhadap efektivitas masing-masing model dapat memberikan wawasan yang lebih tajam terkait keberhasilan dan potensi perbaikan, (2) Penelitian dapat diarahkan untuk memahami lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas manajemen dana pendidikan di tingkat nasional, regional, dan lokal. Hal ini mencakup analisis terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan dana, evaluasi implementasi konsep teoritis, serta penelusuran peran sektor publik dan swasta dalam kemitraan pendidikan.

Selain itu, penelitian dapat merinci upaya konkret yang dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan amanat konstitusi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui pelatihan dan pengembangan guru, dapat menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. Penelitian juga dapat melibatkan perbandingan dengan negara-negara sejenis untuk memberikan perspektif perbandingan yang lebih luas dan mengevaluasi aspek-aspek yang dapat diadopsi dari keberhasilan mereka. Dengan mendasarkan penelitian pada temuan dan implikasi yang telah ada, langkah-langkah ini dapat memberikan kontribusi berharga dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih baik dan efektif di Indonesia.

Simpulan

Hasil pembahasan mengenai konsep teoritis dalam pembiayaan pendidikan menyoroti pentingnya pembiayaan sebagai proses menyediakan sumber daya finansial, baik dalam bentuk uang maupun barang, untuk mendukung dan menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan. Pembiayaan pendidikan memainkan peran vital terhadap ekonomi dan perkembangan suatu negara. Konsep teoritis dalam pembiayaan pendidikan juga mencakup berbagai model dan pendekatan, seperti *Joint Cost* Pendidikan, Pendekatan Kecukupan, Konsep Produksi, dan lainnya. Kelemahan studi ini melibatkan kurangnya fokus pada evaluasi mendalam terhadap implementasi strategi pembiayaan pendidikan yang telah dilakukan di Indonesia. Selain itu, studi mungkin kurang memperhitungkan faktor-faktor lokal yang dapat mempengaruhi efektivitas model pembiayaan, seperti kondisi geografis dan keberagaman budaya di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kontekstual dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait permasalahan pembiayaan pendidikan

di tingkat lokal. Kelemahan studi ini melibatkan kurangnya fokus pada evaluasi mendalam terhadap implementasi strategi pembiayaan pendidikan yang telah dilakukan di Indonesia. Selain itu, studi mungkin kurang memperhitungkan faktor-faktor lokal yang dapat mempengaruhi efektivitas model pembiayaan, seperti kondisi geografis dan keberagaman budaya di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kontekstual dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait permasalahan pembiayaan pendidikan di tingkat lokal.

Referensi

- Armida. (2001). Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Media Akademika*, (26) 1 Januari 2001
- CNBC Indonesia, Arif Gunawan. (2019). *Belanja Pendidikan Tertinggi Ke-2 ASEAN, SDM RI Kok Buruk?*.<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190616011324-4-78604/belanja-pendidikan-tertinggi-ke-2-asean-sdm-ri-kok-buruk>
- Dinda Fitri Monita. (2019). *Pembiayaan dalam Pendidikan*. Artikel Universitas Negeri Padang
- Faisal. (2020). *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia Dan Berbagai Negara*. Zenodo.Org, 1–28.
- Fattah, Nanang. (2009). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Heyneman, SP, Loxley, WAA. (1983). Pengaruh Kualitas Sekolah Dasar Terhadap Akademik. Pencapaian di dua puluh sembilan negara berpendapatan tinggi dan rendah. *Saya. J.Sosiol.* 88 (6 Mei 1983)), 1162–1194
- Kemenkeu. (2022). *Pemerintah Alokasikan Anggaran Pendidikan Tahun 2023 Sebesar Rp608,3 Triliun*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/anggaran-pendidikan-tahun-2023-sebesar-rp608,3-t>
- Lewin, KM, Caillods, F. (2000). *Pembiayaan Sekolah Menengah di Negara Berkembang: Strategi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*. IIEP, UNESCO, Paris
- Lewin, KM. (2018). *Pembelajaran Penting dan Laporan Pembangunan Dunia*. Blog dan Video UKFIET. <https://www.ukfiet.org/2018/learning-matters-and-the-world-development-report-2018/> dan <https://www.ukfiet.org/2018/learning-matters-reaksi-to-the-world-laporan-perkembangan-2018/>

- Lewin, KM. (2018). *Apakah Dana Hasil Pendidikan adalah Pengubah Permainan*. Blog UKFIET. <https://www.ukfiet.org/2018/education-outcomes-fund-eof-for-africa-and-the-middle-east-is-it-a-game-changer/>
- Lewin, KM. (2019). *Puncak Bantuan dan Waktunya untuk Sesuatu yang Berbeda*. Blog UKFIET. <https://www.ukfiet.org/2019/peak-aid-and-time-for-something-different-sustainable-financing-for-education/>
- Lewin, KM. (2020). Melampaui bisnis seperti biasa: Bantuan dan pembiayaan pendidikan di Afrika Sub Sahara. *Jurnal Internasional Perkembangan Pendidikan* 78 (2020) 102247, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102247>
- Lockheed, Verspoor, 1990. *Peningkatan Pendidikan Dasar di Negara Berkembang*. Bank Dunia Washington DC.
- Morphet Edgar C. (1983). *The Economic & Financing of Education*. New Jersey: Prentice Hall. Inc. Engewood Cliffs
- Rida Fironika, K. (2011). Pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 26(1), 43-63. <http://dx.doi.org/10.30659/pendas.2.1.43-64>
- Rukminingsih, R. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan*. Erhaka Utama
- Soedijarto. (2006). *Memahami Makna Yang Tersurat dan Tersirat Dari Pasal Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 64 31 Ayat (4) UUD 1945 Tentang Anggaran Pendidikan*. Jakarta: ISPI
- Supriyadi. (2003). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta
- Sofyan, Y., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Pembiayaan Pendidikan (Suatu Kajian Praktis Dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Sekolah Menengah Umum). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(1), 221-239.

